



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Disamping itu merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LPPD BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari dan menjadi bahan pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Demikian disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini. Diharapkan saran serta masukan guna penyempurnaan penyusunan yang akan datang, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 20 Pebruari 2017

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DR. H. ZAIRIN ZAIN
NIP.19590714 198611 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
Dasar Hukum	1
Gambaran Umum	2
Struktur Organisasi	2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	6
Visi dan Misi	10
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	10
 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 15
Program dan Kegiatan	15
Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan	18
Alokasi dan Realisasi Anggaran	24
Perencanaan Pembangunan	28
Sarana dan Prasarana	30
Permasalahan dan Solusi	31
 BAB III TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	 34
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	34
Dasar Hukum	35
Bidang Kerjasama.....	37

Nama Kegiatan.....	38
Sumber dan Jumlah Anggaran.....	39
Jangka Waktu Kerjasama.....	41
Permasalahan dan Solusi.....	42
Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah	43
Bidang Ekonomi.....	43
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	44
Bidang Pemerintahan dan Aparatur.....	45
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	45
Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah	54
Bidang Statistik dan Pengendalian	56
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	4
Tabel I.2	Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5
Tabel I.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian	6
Tabel I.4	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan.....	7
Tabel I.5	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan	7
Tabel I.6	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon	8
Tabel I.7	Jumlah Pejabat Struktural.....	9
Tabel II.1	Tabel Program Kegiatan Tahun 2015.....	19
Tabel II.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran 2015	25
Tabel II.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2015.....	31
Tabel III.1	Bidang Kerjasama.....	37
Tabel III.2	Nama Kegiatan.....	38
Tabel III.3	Sumber dan Jumlah Anggaran.....	39
Tabel III.4	Jangka Waktu Kerjasama.....	41
Tabel III.5	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Ekonomi	43
Tabel III.6	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (1)	44
Tabel III.7	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (2)	44
Tabel III.8	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang PA	45
Tabel III.9	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (1)	45
Tabel III.10	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (2)	46

Tabel III.11	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (3)	47
Tabel III.12	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (4)	48
Tabel III.13	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (5)	50
Tabel III.14	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (6)	51
Tabel III.15	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (7)	52
Tabel III.16	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (8)	52
Tabel III.17	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (9)	53
Tabel III.18	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang P3D (1)	54
Tabel III.19	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang P3D (2)	55
Tabel III.20	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Statistik dan Pengendalian (1)	56
Tabel III.21	Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Statistik dan Pengendalian (2)	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
2. Peratutran Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016;
4. Cover Dokumen Analisa PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur 2010-2014;
5. Cover Dokumen Analisis PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur 2010-2014;
6. Cover Dokumen Analisis Data Pembangunan Kalimantan Timur;
7. Cover Dokumen Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015;
8. Cover Dokumen Sistem Informasi Data (Sidata) Kalimantan Timur Tahun 2011-2015;
9. Cover Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Kalimantan Timur Tahun 2010-2015;
10. Cover Dokumen Data Indikator Kinerja Daerah Kalimantan Timur Tahun 2015;
11. Cover Dokumen Laporan Triwulan I Kinerja Perekonomian Kalimantan Timur;
12. Cover Dokumen Laporan Triwulan Ii Kinerja Perekonomian Kalimantan Timur;
13. Cover Dokumen Laporan Triwulan Iii Kinerja Perekonomian Kalimantan Timur;
14. Cover Dokumen Laporan Triwulan Iv Kinerja Perekonomian Kalimantan Timur;
15. Dokumen Standar Operasional Prosedur (Sop) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014;
16. Dokumen Surveillance Iso 9001:2008 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

17. Dokumen Audit Surveillance Iso 9001:2008 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
18. Sertifikat Iso 9001 : 2008 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tentang Jasa Layanan Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah);
19. Piagam Penghargaan kategori Pengelolaan Website Terbaik 2015
20. Piagam Penghargaan Kategori Pengelolaan Media Center Terbaik 2015
21. Piagam Penghargaan Kategori Tata Kelola Kearsipan 2015
22. Piagam Penghargaan Pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi
23. Cover Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018;
24. Cover Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
25. Cover Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
26. Cover Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015;
27. Cover Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Apbd 2015 Provinsi Kalimantan Timur;
28. Cover Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan – Apbd 2015 Provinsi Kalimantan Timur;
29. Cover Dokumen Kebijakan Umum Apbd 2016 Provinsi Kalimantan Timur;
30. Cover Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Apbd 2016 Provinsi Kalimantan Timur;
31. Cover Dokumen Laporan Prosedur Evaluasi Kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
32. Cover Rencana Kerja Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015;
33. Cover Dokumen Perencanaan Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015;
34. Cover Dokumen Laporan Entri Sippd Tahap 1 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;

35. Cover Dokumen Laporan Entri Sippd Tahap 2 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
36. Cover Dokumen Laporan Entri Sippd Tahap 3 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
37. Cover Dokumen Laporan Entri Sippd Tahap 4 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
38. Cover Dokumen Laporan Entri Sippd Tahap 5 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
39. Cover Dokumen Laporan Pengelolaan Website Triwulan 1 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
40. Cover Dokumen Laporan Pengelolaan Website Triwulan 2 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
41. Cover Dokumen Laporan Pengelolaan Website Triwulan 3 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
42. Cover Dokumen Laporan Pengelolaan Website Triwulan 4 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
43. Website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2015;
44. Website One Data One Map Provinsi Kalimantan Timur 2015;
45. Website Sistem Informasi Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
46. Website Tepra Kaltim Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
47. Foto Pameran Perencanaan Pembangunan Dalam Pameran Kaltim Fair 2015;
48. Foto Pameran Perencanaan Pembangunan Dalam Pameran Kaltim Fair 2015;
49. Cover Dokumen Laporan Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2016;
50. Cover Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016;
51. Cover Dokumen Laporan Rakor Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
52. Cover Dokumen Laporan Forum SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
53. Cover Dokumen Racangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016;
54. Cover Dokumen Prosiding Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2015;

55. Cover Dokumen Laporan Evaluasi Rpjmd Tahun Kedua Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
56. Cover Dokumen Laporan Kemajuan 2 Evaluasi Tahun Kedua Rpjmd Provinsi Kalimantan Timur;
57. Cover Dokumen Lap Antara Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
58. Cover Dokumen Lap Antara Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
59. Cover Dokumen Lap Penyusunan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
60. Cover Dokumen Lap Koordinasi Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
61. Cover Dokumen Lap Koordinasi Pembangunan Bid Pa Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
62. Cover Dokumen Lap Database Bid Pemerintah dan Aparatur Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
63. Cover Dokumen Lap Evaluasi Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015’
64. Cover Dokumen Lap Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
65. Cover Dokumen Lap Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
66. Cover Dokumen Kajian Konektivitas Transportasi Mendukung Kawasan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
67. Cover Dokumen Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
68. Cover Dokumen Indektifikasi Prog/Keg Rencana Kerjasama Swasta Bidang Infrastruktur Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
69. Cover Dokumen Kegiatan Laporan Koordinasi Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;

70. Cover Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi One Data One Map Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
71. Cover Dokumen Evaluasi Mdgs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
72. Cover Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
73. Cover Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
74. Cover Dokumen Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
75. Cover Dokumen Rencana Strategis Jantung Kalimantan (Heart Of Borneo) 2016-2020 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
76. Cover Dokumen Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Daerah Dalam Penurunan Emisi Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
77. Cover Dokumen Buletin Bulanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
78. Cover Dokumen Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Teptra) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
79. Papan Pengumuman Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
80. Papan Pengumuman Media Elektronik Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
81. Piagam Penghargaan Nominasi Simpul Jaringan Nominasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Terbaik Nasional Tahun 2015;
82. Piagam Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;



BAB I

PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan KEPRES RI Tanggal 18 Maret 1974 Nomor 15 Tahun 1974 dan Surat Keputusan MENDAGRI tanggal 7 Juli 1974 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk melaksanakan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka diterbitkanlah SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.3 Tahun 1980 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja BAPPEDA Tingkat I Kalimantan Timur dan perkembangan terakhir Organisasi BAPPEDA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PERDA Nomor 09 Tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok, yaitu:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh *seorang Kepala Badan* dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:



- 1) Perumus kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang ekonomi;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan dan aparatur;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang statistik dan pengendalian pembangunan;
- 8) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah;
- 9) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 10) Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan;
- 11) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. GAMBARAN UMUM

a. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala
- 2) Sekretariat :

- a) Sub Bidang Perencanaan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Ekonomi :
- a) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya.
- 4) Bidang Pengembangan SDM :
- a) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spritual;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 5) Bidang Pemerintahan dan Aparatur :
- a) Sub Bidang Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Aparatur.
- 6) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah :
- a) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- 7) Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan :
- a) Sub Bidang Statistik dan Pendataan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.
- 8) Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah :
- a) Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah;
 - b) Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada table I.1 dan I.2



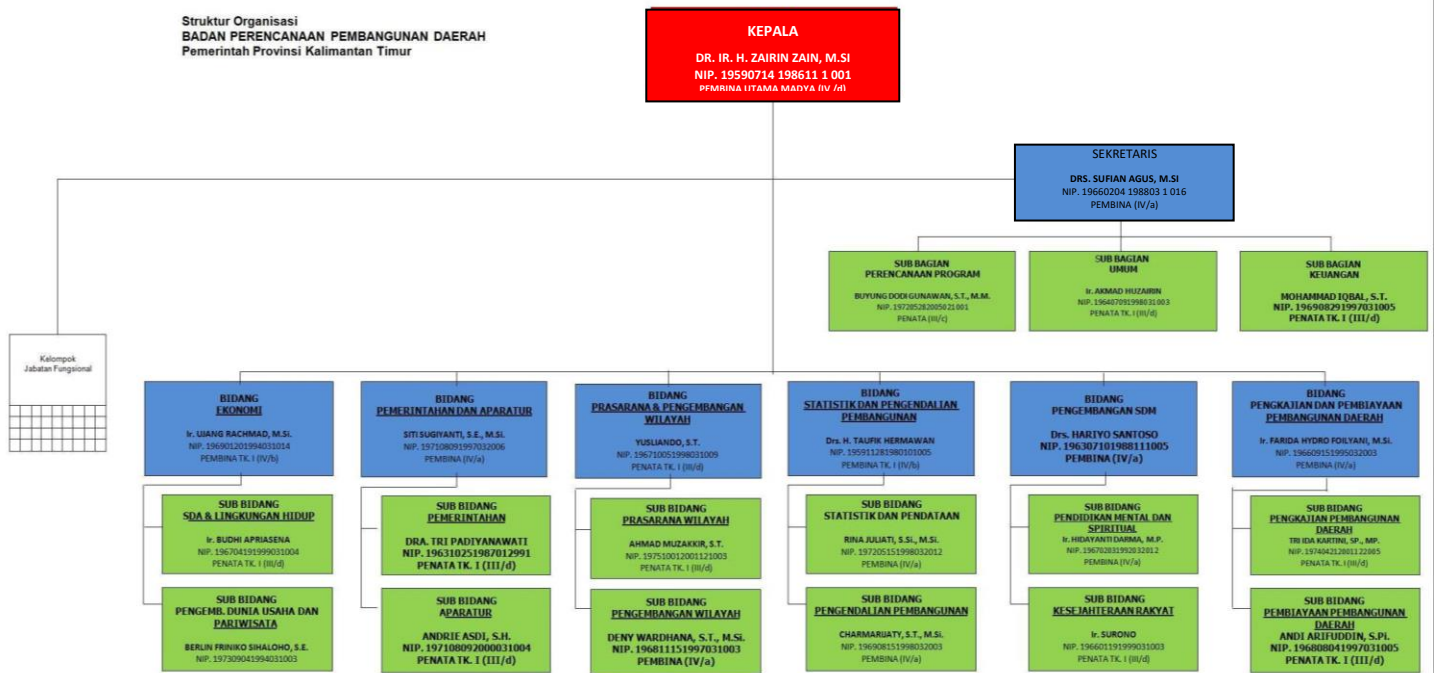
Tabel I.1
Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Urusan Pemerintahan

PERENCANAAN										STATISTIK
<div>KEPALA BAPPEDA PROV. KALTIM</div> <div>SEKRETARIS</div> <div>SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM</div> <div>SUBBAG UMUM</div> <div>SUBBAG KEUANGAN</div>										
BIDANG EKONOMI		BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR		BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		BIDANG PENGEMBANGAN SDM		BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH		BIDANG STATISTIK DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SUBBID SDA & LH	SUBBID PSDU & PAR	SUBBID PEMERINTAHAN	SUBBID APARATUR	SUBBID PRASARANA WILAYAH	SUBBID PENGEMBANGAN WILAYAH	SUBBID PENDIDIKAN & SPIRITUAL	SUBBID KESRA	SUBBID PEMBIAYAAN PD	SUBBID PENGKAJIAN PD	SUBBID PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
										SUBBID STATISTIK DAN PENDAPATAN



Tabel I.2

Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang bekerja di BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 165 (Seratus Enam Lima) orang. Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 116 (Seratus Sebelas) orang, dan Tenaga Non PNS 49 (Empat Puluh Sembilan) orang.

Secara rinci jumlah pegawai dapat dilihat pada Tabel I.2.

Tabel I.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian

JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
PNS	116 Orang
Tenaga Non PNS	49 Orang
<i>Jumlah</i>	165 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2016

Jumlah PNS BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat pendidikan adalah untuk SD sebanyak 4 (empat) orang, SMP 2 (dua) orang, SMA 49 (empat puluh sembilan) orang, Sarjana Muda/Diploma 3 (tiga) orang, Sarjana 37 (tiga puluh tujuh) orang, Pasca Sarjana 20 (dua puluh) orang dan Doktorat 1 (satu) orang. Sedangkan jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklatpim I berjumlah 1 (satu) orang, Diklatpim II berjumlah 2 (dua) orang, Diklatpim III berjumlah 9 (sembilan) orang dan Diklatpim IV berjumlah 16 (enam belas) orang.

Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.3 dan Tabel I.4.



Tabel I.4
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan Umum	Jumlah (Orang)
SD	4 Orang
SMP Sederajat	2 Orang
SMA Sederajat	49 Orang
Diploma 3 (Sarjana Muda)	3 Orang
Sarjana	37 Orang
Pasca Sarjana	20 Orang
Doktoral	1 Orang
Total	116 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2016

Tabel I.5
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan

JENIS PENDIDIKAN & PELATIHAN	JUMLAH
1. Diklatpim I	1 Orang
2. Diklatpim II	2 Orang
3. Diklatpim III	9 Orang
4. Diklatpim IV	16 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2016

Jumlah pegawai BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut; untuk golongan 4 eselon II s/d eselon IV berjumlah 13 (tiga belas) orang, untuk golongan 3 eselon IV berjumlah 10 (sepuluh) orang dan 43 (empat puluh tiga) orang golongan

tiga non eselon, secara rinci jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan eselon dapat dilihat pada Tabel I.5.

Tabel I.6

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan dan Eselon

Golongan	Eselon				Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV		
IV/d		1				1
IV/c						-
IV/b			5			5
IV/a			2	5		7
Jumlah		1	7	5	-	13
III/d				8	5	13
III/c				2	11	13
III/b					27	27
III/a					4	4
Jumlah				10	47	57
II/d					5	5
II/c					25	25
II/b					9	9
II/a					2	2
Jumlah					41	41
I/d					2	2
I/c					1	1
I/b					2	2
I/a						-
Jumlah					5	5
TOTAL	-	1	7	15	93	116

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2016

Jabatan Struktural diisi sebanyak 23 formasi dimana sampai dengan saat ini jabatan fungsional perencanaan belum terisi, karena masih menunggu

terbentuknya Tim Penilai Pejabat Fungsional oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Penjelasan secara rinci mengenai Jumlah Pejabat Struktural tergambar dalam table berikut.

Tabel I.7
Jumlah Pejabat Struktural

Nama Jabatan	Urusan Perencanaan	Urusan Statistik	Total
Kepala	1 Orang		1 Orang
Sekretaris	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bag.Perencanaan Program	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bag. Umum	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bag. Keuangan	1 Orang		1 Orang
Kepala Bidang Ekonomi	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. SDA & Lingkungan Hidup	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bid. PDU, Pariwisata & Budaya	1 Orang		1 Orang
Kepala Bidang Pengembangan SDM	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid.Pendidikan, Mental & Spiritual	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid.Kesejahteraan Rakyat	1 Orang		1 Orang
Kepala Bidang Pemerintahan & Aparatur	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub.Bid.Pemerintahan	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub.Bid. Aparatur	1 Orang		1 Orang
Kepala Bidang Prasarana & Pengembangan Wil.	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bidang Prasarana Wilayah	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bidang Pengembangan Wilayah	1 Orang		1 Orang
Kepala Statistik & Pengendalian Pembangunan		1 Orang	1 Orang
- Kepala Sub. Bid.Statistik & Pendataan		1 Orang	1 Orang
- Kepala Sub. Bid.Pengendalian Pembangunan	1 Orang		1 Orang
Kepala Pengkajian & Pembiayaan Pemb. Daerah	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub.Bid.Pengkajian Pembang. Daerah	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub.Bid.Pembiayaan Pembang. Daerah	1 Orang		1 Orang
Total	21 Orang	2 Orang	23 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2016

c. Visi dan Misi

1) Visi

Sesuai Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Peraturan Gubernur No.46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang SPPN, maka Visi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat Kaltim Tahun 2018”

2) Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Sesuai Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 maka Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dicapai melalui 3 (Tiga) Misi, yaitu :

1. Menyusun Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data Statistik dan Data Spasial.
3. Meningkatkan Pementauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

d. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1) Tujuan

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BAPPEDA selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga



merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi.
3. Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah.

2) Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari ketiga tujuan Renstra BAPPEDA, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai berikut:

1. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran.
2. Tercapainya Kualitas Data dan Informasi serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

3) Strategi

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Sehingga Strategi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Membangun manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan
2. Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran
3. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi
4. Optimalisasi peran BAPPEDA dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di SKPD dan kabupaten/kota
5. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

4) Kebijakan

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dengan berlandaskan analisa dan kajian



pembangunan untuk mencapai tujuan. Kebijakan terkait perencanaan pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Strategi 1:

1. Penyediaan pedoman teknis yang komprehensif dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengintegrasian arsitektur kinerja pembangunan nasional, daerah, SKPD, dan kabupaten/kota;
3. Pengintegrasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Pengembangan dan integrasi penanganan permasalahan-permasalahan pembangunan; dan
5. Penjaringan aspirasi dan partisipatif stakeholder skala nasional dan regional.

b) Strategi 2:

1. Peningkatan profesionalisme TAPD dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan; dan
2. Pengintegrasian sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah.

c) Strategi 3:

1. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat dan tepat waktu; dan
2. Pengintegrasian sistem informasi pembangunan antarbidang di BAPPEDA, antara BAPPEDA dan SKPD, serta antara provinsi dan kabupaten/kota

d) Strategi 4:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan;
2. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan SKPD (tahunan); dan
3. Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan tahunan.



e) Strategi 5:

1. Pengevaluasian keselarasan implementasi peraturan perundangan perencanaan pembangunan daerah di tingkat pusat hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Evaluasi kinerja pembangunan (*impact, outcome, dan output*);
3. Perbaikan integrasi berbagai laporan dan evaluasi kinerja;
4. Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah;
5. Penggunaan sistem informasi dalam monitoring dan pengendalian hasil pelaksanaan pembangunan.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2016 merupakan Tahun Ketiga pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah implementasi dari Misi ke-4, yaitu :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN DAN BEORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”**

Pada Tahun 2016 dilaksanakan 18 (sembilan belas) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Penyediaan makanan dan minuman
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - m. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah



- n. Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutib/berkala sasaran pengolahan dan penyiapan Arsip
 - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - f. Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim
 - g. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001
- 3. Program Peningkatan Disiplin Apratur
Kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan :
 - a. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah
- 5. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan :
 - a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :



- a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
 - b. Penyusunan Analisis Jabatan
 - c. Koordinasi penyusunan Rencana Kerja
 - d. Koordinasi penyusunan RKA dan DPA
 - e. Pengembangan Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - f. Penyebar Luasan Capaian Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
 - b. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
 - c. Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur
10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kegiatan :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat
- b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

Kegiatan :

- a. Penyusunan Rancangan RKPD
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- c. Penetapan RKPD

12. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD
- b. Penetapan Perubahan RPJMD

14. Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD

15. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan



16. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
 - a. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota
 - b. Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca

17. Pengembangan Data Statistik dan Spasial
Kegiatan :
 - a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan :
 - a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

B. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2016 Bappeda melaksanakan tugas utama melalui serangkaian tahapan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015.



Tabel II.1
Tabel Program/Kegiatan Tahun 2016

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg SKPD thn 2016		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		6	7	8
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100	100	100.00
1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	lembar	5000	5000	100.00
1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	bulan	12	12	100.00
1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	unit	50	50	100.00
1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	bulan	12	12	100.00
1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Bulan Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	bulan	12	12	100.00
1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan ATK untuk kesekretariatan	bulan	12	12	100.00
1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100.00
1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	bulan	12	12	100.00
1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadam)	bulan	12	12	100.00
1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	eksemplar	60	60	100.00
1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	bulan	12	12	100.00
1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	30	30	100.00
1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kegiatan	14	14	100.00
1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	bulan	12	12	100.00
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100.00
1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	jenis	6	6	100.00
1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	12	12	100.00
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	bulan	12	12	100.00
1.06.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Bulan Terpelihara Dokumen Arsip	bulan	12	12	100.00
1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan yang direhab	unit	1	1	100.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg SKPD thn 2016		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.06.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim	Acara-acara Pemprov dan Perayaan Nasional yang difasilitasi	acara	6	6	100.00
1.06.02.46	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001	Jumlah Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008	sertifikat	1	1	100.00
1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara	%	100	100	100.00
1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	240	240	100.00
1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	360	360	100.00
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	90	100	111.11
1.06.06.05	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIP, RKT, PK	Dokumen	3	3	100.00
1.06.06.06	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	Dokumen LPPD	Dokumen	1	1	100.00
1.06.15	Program pengembangan data/informasi	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100
1.06.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	Dokumen	14	14	
		Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan (KDA, Bulletin, PDRB, dll)	%			
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan	0.7	70	100	142.86
1.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen	1	1	100.00
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat	kunjungan	10	10	100.00
1.06.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan perencana dan dokumen perencanaan	%	75	100	133.33
1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	orang	50	50	100.00
1.06.20.04	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen	1	1	100.00
1.06.20.05	Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Rancangan Renja dan Renja	Dokumen	2	2	100.00
		Dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Dokumen			
1.06.20.07	Koordinasi penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan	Dokumen	4	4	100.00
1.06.20.08	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahapan	6	6	100.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg SKPD thn 2016		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.06.20.09	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya	bulan	12	12	100.00
1.06.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	70	100	142.86
1.06.30.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK	Laporan	5	5	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor PDU-EK	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor PDU-EK	Laporan	4	4	100.00
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU - EK	Dokumen	1	1	100.00
1.06.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor SDA-LH	Laporan	5	5	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor SDA-LH	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH	Laporan	4	4	100.00
		Dokumen perencanaan pembangunan sektor SDA-LH	Dokumen	1	1	100.00
1.06.31	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan	%	75	100	133.33
1.06.31.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Prasarana Wilayah	Laporan	5	5	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Prasarana Wilayah	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Prasarana Wilayah	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah	Laporan	4	4	100.00
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah	Dokumen	2	2	100.00
1.06.31.02	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	Dokumen	1	1	100.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg SKPD thn 2016		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
		Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur	Dokumen	1	1	100.00
		Laporan BKPRD Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1	1	100.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	5	5	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	4	4	100.00
1.06.31.04	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	data	600	600	100.00
		Terselenggaranya Forum One Data One Map	Kegiatan			
		Terselenggaranya Rakor One Data One Map	Kegiatan			
1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur	%	70	100	142.86
1.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pemerintahan	Laporan	5	5	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pemerintahan	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan	Laporan	4	4	100.00
1.06.32.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	Dokumen perencanaan pembangunan sektor Aparatur	Dokumen	1	1	100.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Aparatur	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Aparatur	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur	Laoran	4	4	100.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg SKPD thn 2016		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	62	100	161.29
1.06.33.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	1	1	100.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	5	5	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	4	4	100.00
1.06.33.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	1	1	100.00
		Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang Pendidikan	Laporan	1	1	100.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	5	5	100.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	10	10	100.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	4	4	100.00
1.06.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	100	100	100.00
1.06.37.01	Penyusunan Rancangan RKP	Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir RKP	Dokumen	3	3	100.00
		Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	unsur	4	4	100.00
1.06.37.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	orang	250	250	100.00
		Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD	orang	45	45	100.00
		Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKP	orang	600	600	100.00
1.06.37.03	Penetapan RKP	Pergub RKP	Pergub	1	1	100.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg SKPD thn 2016		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.06.38	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi	%	83	100	120.48
1.06.38.01	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan IV Tahun 2015 dan Triwulan I, II, III Tahun 2016.	Laporan	4	4	100.00
		Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kab/Kota Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016.	Laporan	2	2	100.00
		Dokumen Evaluasi RKPD	Dokumen	1	1	100.00
1.06.39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	Persentase Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	%			
1.06.39.03	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD	dokumen	1	1	100,00
1.06.39.04	Penetapan Perubahan RPJMD	Perda Perubahan RPJMD	Perda	1	-	-
1.06.41	Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif	%	100	100	100.00
1.06.41.01	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	Dokumen	8	8	100.00
1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	83	100	120.48
1.06.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPRA dan LKPJ	Dokumen	5	5	100.00
1.06.42.02	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Dokumen laporan gugus kendali	Dokumen	1	1	100.00
1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	kab/kota	1	1	100.00
1.06.45.01	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah Karbon (RAD/GRK)	Dokumen	1	1	100.00
1.06.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota	kab/kota	1	1	100.00
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif	%	100	100	100.00
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Pengelolaan Keuangan SKPD	bulan	12	12	100.00
		Dokumen CALK	Dokumen	1	1	100.00
1.23.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	88	100	113.64



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg SKPD thn 2016		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.23.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	Dokumen	14	14	100.00

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Perda Prov.Kaltim Nomor 8 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016, Perda Prov.Kaltim Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Pergub Kaltim Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan Pergub Kaltim Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 2016, alokasi anggaran untuk Bappeda Prov. Kaltim sebesar Rp.61.656.699.000,00 untuk anggaran murni dan Rp.50.943.688.850,00 untuk anggaran perubahan dengan 18 (delapan belas) program yang meliputi 52 (lima puluh dua) kegiatan.

Rincian Anggaran Bappeda Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

1)	An
Anggaran 2016 (Murni)	Rp.61.656.699.000,00
A.	Bel
Belanja Tidak Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp.13.925.699.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.13.925.699.000,00
B.	Bel
Belanja Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp.10.770.500.000,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar	Rp.12.559.880.000,00
- Belanja Modal sebesar	<u>Rp. 4.400.620.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.47.731.000.000,00



2) Anggaran Perubahan 2016	Rp.50.943.688.850,00
A. Belanja Tidak Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp.13.998.015.850,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.13.998.015.850,00
B. Belanja Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp. 8.483.630.000,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar	Rp.24.710.296.000,00
- Belanja Modal sebesar	<u>Rp. 3.752.347.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.36.945.673.000,00

Selisih Anggaran Murni dan Perubahan sebesar **Rp. -10.713.010.150,00**

Secara umum realisasi keuangan Tahun 2016, terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.13.925.699.000,00 dari pagu dana sebesar Rp.12.654.604.297. atau 90,40%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.34.455.435.804,- dari pagu dana sebesar Rp.36.945.673.000,- atau 93,26%. Realisasi Jenis Belanja Langsung sebagai berikut:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.7.762.279.000,- atau 91,50% dari dana yang ditetapkan dari pagu dana sebesar Rp.8.483.030.000,-
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.22.955.071.804,- atau 92,90% dari dana yang ditetapkan dari pagu dana sebesar Rp.24.710.296.000,-
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.3.738.085.000,- atau 99,62% dari dana yang ditetapkan dari pagu dana sebesar Rp.3.752.347.000,-



Rincian alokasi dan realisasi anggaran dan capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel II.2

Tabel II.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran 2016

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	2	3	4	5	6
1.06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50,943,688,850			
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	46,026,497,680			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,925,699,000	12,654,604,297	90.40%	
5.1.1	Belanja Pegawai	13,925,699,000	12,654,604,297	94.48%	100.00%
5.2	BELANJA LANGSUNG	36,945,673,000	34,455,435,804	93,26%	
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,472,041,831	3,855,691,733	86.22	
1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	9,999,000	99.99	100.00%
1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,739,500,000	1,399,757,678	80.47	100.00%
1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36,600,000	23,781,100	64.98	100.00%
1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	619,025,000	618,500,000	99.92	100.00%
1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	160,400,000	150,894,545	94.07	100.00%
1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	75,000,000	74,856,500	99.81	100.00%
1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49,555,200	48,968,600	98.82	100.00%
1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50,000,000	49,989,400	99.98	100.00%
1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	195,000,000	194,954,000	99.98	100.00%
1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	64,700,000	64,700,000	100	100.00%
1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	125,000,000	124,843,300	99.87	100.00%
1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	665,484,631	534,638,710	80.34	100.00%
1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	454,977,000	360,408,900	79.21	100.00%
1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	226,800,000	199,400,000	87.92	100.00%
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,708,297,000	5,608,677,826	98.25	
1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	2,119,097,000	2,117,297,000	99.92	100.00%
1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	727,000,000	696,328,796	95.78	100.00%



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	2	3	4	5	6
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	557,000,000	555,122,830	99.66	100.00%
1.06.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	150,700,000	105,045,400	69.7	100.00%
1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1,793,500,000	1,779,588,000	99.22	100.00%
1.06.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim	269,500,000	269,495,800	100	100.00%
1.06.02.46	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001	91,500,000	85,800,000	93.77	100.00%
1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	387,800,000	385,200,000	99.33	100.00%
1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	266,300,000	265,800,000	99.81	100.00%
1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	121,500,000	119,400,000	98.27	100.00%
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31,870,200	31,870,200	100	
1.06.06.05	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	18,997,000	18,997,000	100	100.00%
1.06.06.06	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	12,873,200	12,873,200	100	100.00%
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	399,293,600	385,292,615	96.49	100.00%
1.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	399,293,600	385,292,615	96.49	100.00%
1.06.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1,687,047,461	1,530,631,960	90.73	100.00%
1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	97,500,000	84,878,274	87.05	100.00%
1.06.20.04	Penyusunan Analisis Jabatan	25,000,000	8,960,000	35.84	100.00%
1.06.20.05	Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	35,938,900	35,938,900	100	100.00%
1.06.20.07	Koordinasi penyusunan RKA dan DPA	39,974,000	33,021,000	82.61	100.00%
1.06.20.08	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	913,739,061	850,406,991	93.07	100.00%
1.06.20.09	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	574,895,500	517,426,795	90	100.00%
1.06.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	2,268,074,000	2,113,665,005	93.19	100.00%
1.06.30.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	1,411,454,000	1,264,672,395	89.6	100.00%



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	2	3	4	5	6
1.06.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	856,620,000	848,992,610	99.11	100.00%
1.06.31	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	3,860,897,208	3,719,902,547	96.35	100.00%
1.06.31.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	1,689,819,369	1,678,900,528	99.35	100.00%
1.06.31.02	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	1,227,077,839	1,208,698,247	98.5	100.00%
1.06.31.04	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	944,000,000	832,303,772	88.17	100.00%
1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2,504,670,000	2,466,354,680	98.47	
1.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1,803,730,000	1,803,018,880	99.96	100.00%
1.06.32.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	700,940,000	663,335,800	94.64	100.00%
1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,357,580,000	1,298,055,792	95.62	100.00%
1.06.33.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat	864,870,000	835,794,446	96.64	100.00%
1.06.33.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	492,710,000	462,261,346	93.82	100.00%
1.06.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	3,171,450,000	2,879,195,850	90.78	
1.06.37.01	Penyusunan Rancangan RKPD	832,950,000	778,330,270	93.44	100.00%
1.06.37.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	2,243,500,000	2,007,676,580	89.49	
1.06.37.03	Penetapan RKPD	95,000,000	93,189,000	98.09	100.00%
1.06.38	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1,426,910,000	1,180,318,908	82.72	100.00%
1.06.38.01	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	1,426,910,000	1,180,318,908	82.72	100.00%
1.06.39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	1,292,300,000	1,013,693,093	78.44	100.00%
1.06.39.03	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	1,207,300,000	1,013,693,093	83.96	100.00%
1.06.39.04	Penetapan Perubahan RPJMD	85,000,000	0	0	
1.06.41	Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah	1,736,200,000	1,705,522,684	98.23	100.00%
1.06.41.01	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD	1,736,200,000	1,705,522,684	98.23	100.00%



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	2	3	4	5	6
1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,999,498,000	1,825,704,431	91.31	100.00%
1.06.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1,999,498,000	1,825,704,431	91.31	100.00%
1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	663,480,000	605,392,380	91.25	100.00%
1.06.45.01	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	380,480,000	367,074,880	96.48	100.00%
1.06.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	283,000,000	238,317,500	84.21	100.00%
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1,489,443,700	1,382,301,200	92.81	100.00%
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	1,489,443,700	1,382,301,200	92.81	100.00%
1.23.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	2,488,820,000	2,467,964,900	99.16	100.00%
1.23.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	2,488,820,000	2,467,964,900	99.16	100.00%

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tahun 2016 merupakan Tahun Ketiga pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Bappeda Prov. Kaltim mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah. Bappeda juga wajib ikut mensinergikan perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan Bappeda sendiri untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi serta dapat memecahkan isu strategis daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada tahun 2016 Bappeda menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD Tahunan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016.

Penyusunan Renja Tahun 2016 harus berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 yang dalam penyusunannya mengangkat isu-isu strategis :

1. Peningkatan kualitas sumber daya yang ada secara optimal dan peningkatan aparatur perencana secara professional dengan prinsip good governance;
2. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel;
3. Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan dan kajian strategis pembangunan serta keterlibatan *stakeholders* dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta memperkuat koordinasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi pembangunan.

Terhadap isu-isu strategis perencanaan pembangunan diatas, Bappeda menentukan program dan kegiatan yang mengacu pada 10 (sepuluh) program urusan perencanaan pembangunan dan 1 program urusan statistik, yaitu:

**Urusan Perencanaan Pembangunan**

1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
7. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
9. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Green Ekonomi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Statistik

1. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Bappeda perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang digambarkan dalam tabel II.3

Tabel II.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2015

NO	URAIAN	UNIT
1	Tanah	8.700 m ²
2	Bangunan Gedung terdiri dari : a. Ruang Kerja b. Ruang Rapat c. Ruang GSCC d. Ruang Server e. Mushola f. Ruang Saji g. Ruang Arsip h. Kantin i. Gudang j. Lapangan Tennis	6.525 m ² 11 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
3	Alat Angkutan a. Kendaraan Roda 4 b. Kendaraan Roda 2	23 unit 38 unit
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	238 Unit
5	Komputer PC / laptop / Notebook / Server	285 unit
6	Printer	112 unit
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.555 unit

Sumber : Buku Inventaris Barang Bappeda Prov.Kaltim Tahun 2016 Per Desember 2016

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Belum maksimalnya pengendalian/koordinasi dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD;
- 2) Belum lengkapnya data dan informasi pembangunan melalui sistem informasi sehingga penggunaan data dan informasi pembangunan dalam proses perencanaan belum maksimal;

- 3) Belum digunakannya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya secara optimal;
- 4) Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan pembangunan;
- 5) Belum optimalnya penggunaan sistem informasi, baik di Bappeda maupun di SKPD;
- 6) Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh masyarakat;
- 7) Ketergantungan pendanaan Pemprov. Kaltim pada Dana Perimbangan yang dapat berubah-ubah sehingga dapat menyebabkan inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran;
- 8) Belum maksimalnya penjangkauan usulan perencanaan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga yang juga menyebabkan terjadinya inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran.

Beberapa upaya/solusi peningkatan kualitas perencanaan yang harus diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

- 1) Melakukan pengendalian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD melalui rapat koordinasi pengendalian Renstra SKPD per-triwulan.
- 2) Mengoptimalkan sistem informasi data dan spasial dengan terus melakukan koordinasi baik antar bidang perencanaan maupun dengan SKPD.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi pengendalian secara berkala dan dihadiri oleh unsur pimpinan SKPD.
- 4) Meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami perencanaan dalam merumuskan, mengkaji serta mengevaluasi pembangunan daerah melalui pelatihan, diskusi dan koordinasi dengan instansi vertikal dan perguruan tinggi.
- 5) Secara konsisten memberikan informasi, pemahaman, dan pendalaman mengenai pentingnya sistem informasi dalam proses perencanaan kepada bidang perencanaan Bappeda dan SKPD.



- 6) Secara konsisten terus menginformasikan proses perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk media online.
- 7) Terus melakukan kordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengelolaan keuangan mulai dari proses awal perencanaan sehingga inkosisten dapat dihilangkan.
- 8) Terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama DPRD untuk dapat menjaring aspirasi dari masyarakat yang dapat dimasukkan dari awal proses perencanaan.



BAB III

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Prov. Kaltim memiliki peran besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Prov. Kaltim. BAPPEDA juga harus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan arah pembangunan yang kian kompleks.

BAPPEDA Prov. Kaltim memiliki agenda utama yakni menyelesaikan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Agenda utama tersebut dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul pada waktu ke depan dimana salah satunya akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis.

Salah satu cara yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi adalah melakukan dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi yang layak untuk membantu tugas-tugas yang diberikan oleh BAPPEDA .

Untuk mendukung tupoksi BAPPEDA Prov. Kaltim, pada tahun 2016 dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain:

1. Mendukung Proses Perencanaan:
 - a. Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2 (Lanjutan)
 - b. Prediksi Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perekonomian Kaltim
 - c. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Hijau (MPEH) Kalimantan Timur 2015-2030



- d. Identifikasi Program/Kegiatan Rencana Kerjasama Pemerintah Swasta Bidang Infrastruktur
- e. Penyusunan Tahapan, Tatacara Konsultasi & Evaluasi Raperda RTRW, RDTR, dan PZ Kab/Kota
- f. Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD
- g. Pengembangan SIPPD
- 2. Mendukung Proses Evaluasi dan Pengendalian:
 - a. Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
 - b. Jasa Lainnya Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi TEPPA Provinsi Kaltim
- 3. Mendukung Proses Penyediaan Data dan Informasi:
 - a. Sistem Informasi Data Kalimantan Timur
 - b. Penyusunan Rencana Induk Pengolaan One Data One Map
 - c. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang One Data One Map
 - d. Pemutakhiran Aplikasi One Data One Map
 - e. Proses migrasi data dan pembuatan metadata
 - f. Konsultasi Pertumbuhan Ekonomi
 - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Data Center dan Geo Spatial Command Center One Data One Map
 - h. Pengadaan Peralatan Audio Visual Ruang GSCC
 - i. Pengadaan Lisensi Software GIS Advanced
 - j. Pengadaan Fire Suppression System Ruang Data Center
 - k. Pengadaan Alat Kantor Ruang Data Center dan GSCC
 - l. Pengadaan Server, Storage, Komputer dan Peralatan Penunjang Ruang Data Center dan GSCC
 - m. Pengadaan Alat Survey Udara dan Survey Elektronik

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);



- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan” ;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang “ Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ”;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).
- 7) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
- 8) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Pengembangan Telematika di Indonesia”
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- 11) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” ;
- 12) Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang “Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah ”;
- 13) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 14) Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Prov. Kaltim Tahun 2005 – 2025;
- 15) Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov. Kaltim Tahun 2013 – 2014;



2. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Bidang Kerjasama

No.	Pekerjaan	Bidang Kerjasama
1	Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2 (Lanjutan)	Konsultasi Perencanaan
2	Prediksi Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perekonomian Kaltim	Konsultasi Perencanaan
3	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Hijau (MPEH) Kalimantan Timur 2015-2030	Konsultasi Perencanaan
4	Identifikasi Program/Kegiatan Rencana Kerjasama Pemerintah Swasta Bidang Infrastruktur	Konsultasi Perencanaan
5	Penyusunan Tahapan, Tatacara Konsultasi & Evaluasi Raperda RTRW, RDTR, dan PZ Kab/Kota	Konsultasi Perencanaan
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	Teknologi Informasi
7	Pengembangan SIPPD	Teknologi Informasi
8	Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Konsultasi Survey
9	Jasa Lainnya Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi TEPPA Provinsi Kaltim	Teknologi Informasi
10	Sistem Informasi Data Kalimantan Timur	Teknologi Informasi
11	Penyusunan Rencana Induk Pengolaan One Data One Map	Konsultasi Perencanaan
12	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang One Data One Map	Konsultasi Hukum
13	Pemutakhiran Aplikasi One Data One Map	Teknologi Informasi
14	Proses migrasi data dan pembuatan metadata	Teknologi Informasi
15	Konsultasi Pertumbuhan Ekonomi	Konsultasi Perencanaan
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Data Center dan Geo Spatial Command Center One Data One Map	Konstruksi
17	Pengadaan Peralatan Audio Visual Ruang GSCC	Pengadaan Barang
18	Pengadaan Lisensi Software GIS Advanced	Teknologi Informasi
19	Pengadaan Fire Suppression System Ruang Data Center	Pengadaan Barang
20	Pengadaan Alat Kantor Ruang Data Center dan GSCC	Pengadaan Barang

No.	Pekerjaan	Bidang Kerjasama
21	Pengadaan Server, Storage, Komputer dan Peralatan Penunjang Ruang Data Center dan GSCC	Teknologi Informasi
22	Pengadaan Alat Survey Udara dan Survey Elektronik	Pengadaan Barang

3. Nama Kegiatan

Nama Pekerjaan dan Kegiatan dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel III.2
Nama Kegiatan

No.	Pekerjaan	Kegiatan
1	Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2 (Lanjutan)	Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional
2	Prediksi Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perekonomian Kaltim	Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional
3	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Hijau (MPEH) Kalimantan Timur 2015-2030	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
4	Identifikasi Program/Kegiatan Rencana Kerjasama Pemerintah Swasta Bidang Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
5	Penyusunan Tahapan, Tatacara Konsultansi & Evaluasi Raperda RTRW, RDTR, dan PZ Kab/Kota	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
7	Pengembangan SIPPD	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
8	Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
9	Jasa Lainnya Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi TEPPA Provinsi Kaltim	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
10	Sistem Informasi Data Kalimantan Timur	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
11	Penyusunan Rencana Induk Pengolaan One Data One Map	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
12	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang One Data One Map	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
13	Pemutakhiran Aplikasi One Data One Map	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map



No.	Pekerjaan	Kegiatan
14	Proses migrasi data dan pembuatan metadata	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
15	Konsultasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Data Center dan Geo Spatial Command Center One Data One Map	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
17	Pengadaan Peralatan Audio Visual Ruang GSCC	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
18	Pengadaan Lisensi Software GIS Advanced	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
19	Pengadaan Fire Suppression System Ruang Data Center	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
20	Pengadaan Alat Kantor Ruang Data Center dan GSCC	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
21	Pengadaan Server, Storage, Komputer dan Peralatan Penunjang Ruang Data Center dan GSCC	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map
22	Pengadaan Alat Survey Udara dan Survey Elektronik	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran kegiatan kerjasama terinci pada tabel berikut:

Tabel III.3
Sumber dan Jumlah Anggaran

No.	Pekerjaan	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2 (Lanjutan)	1,300,000,000	APBD
2	Prediksi Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perekonomian Kaltim	200,000,000	APBD
3	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Hijau (MPEH) Kalimantan Timur 2015-2030	1,600,000,000	APBD
4	Identifikasi Program/Kegiatan Rencana Kerjasama Pemerintah Swasta Bidang Infrastruktur	50,000,000	APBD
5	Penyusunan Tahapan, Tatacara Konsultasi &	50,000,000	APBD



No.	Pekerjaan	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
	Evaluasi Raperda RTRW, RDTR, dan PZ Kab/Kota		
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	200,000,000	APBD
7	Pengembangan SIPPD	100,000,000	APBD
8	Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	600,000,000	APBD
9	Jasa Lainnya Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi TEPPA Provinsi Kaltim	150,000,000	APBD
10	Sistem Informasi Data Kalimantan Timur	200,000,000	APBD
11	Penyusunan Rencana Induk Pengolaan One Data One Map	200,000,000	APBD
12	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang One Data One Map	100,000,000	APBD
13	Pemutakhiran Aplikasi One Data One Map	500,000,000	APBD
14	Proses migrasi data dan pembuatan metadata	400,000,000	APBD
15	Konsultansi Pertumbuhan Ekonomi	50,000,000	APBD
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Data Center dan Geo Spatial Command Center One Data One Map	300,000,000	APBD
17	Pengadaan Peralatan Audio Visual Ruang GSCC	1,250,700,000	APBD
18	Pengadaan Lisensi Software GIS Advanced	1,500,000,000	APBD
19	Pengadaan Fire Suppression System Ruang Data Center	415,000,000	APBD
20	Pengadaan Alat Kantor Ruang Data Center dan GSCC	540,000,000	APBD
21	Pengadaan Server, Storage, Komputer dan Peralatan Penunjang Ruang Data Center dan GSCC	4,499,750,000	APBD
22	Pengadaan Alat Survey Udara dan Survey Elektronik	410,000,000	APBD

5. Jangka Waktu Kerjasama

Tabel III.4
Jangka Waktu Kerjasama

No.	Pekerjaan	Waktu Kerjasama
1	Penyusunan Site Plan KIPI Maloy Tahap 2 (Lanjutan)	6 bulan
2	Prediksi Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perekonomian Kaltim	4 bulan
3	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Hijau (MPEH) Kalimantan Timur 2015-2030	5 bulan
4	Identifikasi Program/Kegiatan Rencana Kerjasama Pemerintah Swasta Bidang Infrastruktur	3 bulan
5	Penyusunan Tahapan, Tatacara Konsultasi & Evaluasi Raperda RTRW, RDTR, dan PZ Kab/Kota	3 bulan
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	11 bulan
7	Pengembangan SIPPD	2 bulan
8	Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	5 bulan
9	Jasa Lainnya Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi TEPPA Provinsi Kaltim	12 bulan
10	Sistem Informasi Data Kalimantan Timur	3 bulan
11	Penyusunan Rencana Induk Pengolaan One Data One Map	1.5 bulan
12	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang One Data One Map	2 bulan
13	Pemutakhiran Aplikasi One Data One Map	2 bulan
14	Proses Migrasi Data dan Pembuatan Metadata	2 bulan
15	Konsultasi Pertumbuhan Ekonomi	2 bulan
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Data Center dan Geo Spatial Command Center One Data One Map	3 bulan
17	Pengadaan Peralatan Audio Visual Ruang GSCC	2 bulan
18	Pengadaan Lisensi Software GIS Advanced	3 bulan
19	Pengadaan Fire Suppression System Ruang Data Center	2 bulan
20	Pengadaan Alat Kantor Ruang Data Center dan GSCC	2 bulan

No.	Pekerjaan	Waktu Kerjasama
21	Pengadaan Server, Storage, Komputer dan Peralatan Penunjang Ruang Data Center dan GSCC	2 bulan
22	Pengadaan Alat Survey Udara dan Survey Elektronik	3 bulan

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Minimnya jumlah dan minat pihak ketiga yang memiliki kompetensi sehingga waktu yang diperlukan untuk pemilihan lebih lama.
- Beragamnya persepsi perencanaan sehingga dalam menentukan arah perencanaan menjadi bias.
- Belum sepenuhnya pemahaman SDM terhadap teknologi informasi.
- Masih diperlukannya personal yang khusus menguasai teknologi informasi.

Solusi yang harus dilakukan:

- Melakukan pemilihan di awal tahun anggaran dan lebih memperjelas dan mempertajam KAK pada setiap kegiatan.
- Perlunya dilakukan pelatihan secara periodik dan mendetail bagi pengguna sistem informasi.
- Perlunya dilakukan koordinasi yang intensif baik dari antar institusi dan pihak pengembang sistem informasi baik di internal maupun di eksternal Prov. Kaltim.
- Mengusulkan tambahan personil SDM yang handal dalam teknologi informasi.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Koordinasi dengan Instansi Vertikal dirincikan berdasarkan Bidang yang ada di Bappeda Prov. Kaltim dengan rincian:

1) Bidang Ekonomi

Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Ekonomi

Tabel III.5

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Pangan dan Gizi
2	Materi Koordinasi	Identifikasi capaian program dan kegiatan Pangan dan Gizi
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BPS dan BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBN : (Kegiatan Dekonsentrasi : Pemantauan rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) Rp. 87.495.000
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	6 Kali Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pemantauan Intenal
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Program dan kegiatan RAD pangan dan gizi dapat tercapai sesuai dengan hasil yang ditargetkan dalam mencapai pilar-pilar pengentasan permasalahan pangan dan gizi prov.kaltim (matrik hasil identifikasi terlampir)
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Review/penyesuaian RAD PG terhadap RAN PG (rencana aksi nasional dan gizi) 2015-2019 dan renstra SKPD

2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (1)

Tabel III.6

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi TKPK Prov. Kaltim Rapat Koordinasi Pencapaian target MDGs
2	Materi Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dan perkembangan Jumlah penduduk miskin di Kaltim Informasi capaian dan tujuan target MDGs
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BPS, TNP2K, Bappenas, Kemendagri, dan BKKBN
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Rp.872.000.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang	2 Kegiatan

	Dilaksanakan	
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Informasi tentang data Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (2)
Tabel III.7

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Tim Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pendidikan
2	Materi Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pendidikan • Pembahasan capaian Evaluasi Bidang Pendidikan
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BPS
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Rp.495.000.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Paket
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Mengetahui perkembangan kemajuan pembangunan Pendidikan di Kalimantan Timur
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan pendidikan

3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang PA
Tabel III.8

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	
2	Materi Koordinasi	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Universitas Mulawarman
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Prov. Kaltim Rp.301.000.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan (Survei Indeks Persepsi Korupsi Kaltim)
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terukurnya Indeks Persepsi Korupsi Prov. Kaltim Tahun 2015 sesuai dengan Program Pemerintah Provinsi • Diharapkan mampu mengukur tingkat IPK



		Prov. Kaltim sesuai Tolok Ukur Pelayanan Publik
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Hasil Survei IPK dapat dilihat pada Laporan singkat pelaksanaan IPK

4) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
 Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (1)
 Tabel III.9

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah One Data One Map
2	Materi Koordinasi	Pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Daerah One Data One Map Berdasarkan 5 Pilar (Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur & Teknologi, Standar Data Geospasial, Sumber Daya Manusia)
3	Instansi Pusat Yang Terlibat	Badan Informasi Geospasial
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Prov. Kaltim TA. 2015 Rp. 11.684.650.000.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Lebih dari 10 kali
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Geospasial DIGD One Data One Map • Konsultasi Pengembangan Data Center • Konsultasi Pembangunan GSCC • Konsultasi Penyusunan Rencana Induk One Data One Map • Konsultasi Penyusunan Metadata Geospasial berdasarkan KUGI
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Executive dashboard dalam Geospasial • Pembuatan Metadata dan Penyusunan database berdasar • Pembangunan dan Pemeliharaan Dak Center dan GSCC sesuai standar • Penetapan Pergub tentang Od-Map • Pengaplikasian Rencana Induk One data One Map

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
 Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (2)
 Tabel III.10

NO	ITEM	DESKRIPSI
----	------	-----------

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Persiapan Rapat Kerja (RAKER) Kementerian PUPR TA. 2015 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015 di Gedung Serbaguna Kementerian PUPR Jakarta.
2	Materi Koordinasi	<p>Materi Persiapan Rapat Kerja (RAKER) Kementerian PUPR TA. 2015 yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi Aparatur Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2. Penyampaian Hasil Evaluasi 2014 sebagai Baseline dan Strategi Pelaksanaan Program 3. Pengarahan dan Strategi Pelaksanaan Program TA. 2015 Kementerian PUPR 4. Sosialisasi Pelaksanaan lelang sesuai Perpres 04 tahun 2015 5. identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda Provinsi Se-Indonesia, Dinas PU Provinsi Se-Indonesia
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	<p>Sumber Dana APBD Prov.</p> <p>Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp 8.441.300</p>
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersosialisasinya program kerja Kementerian PUPR • Tersosialisasinya mekanisme pelaksanaan lelang sesuai perpres 04 tahun 2015 pada program kegiatan Kementerian PUPR • Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur PUPR • Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR dan Rencana Kerja SKPD PU
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<p>Sebagai bahan Usulan Musrenbang Nasional untuk Rencana Kerja Kementerian PUPR</p> <p>Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian PUPR dengan Renja SKPD</p>

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (3)
Tabel III.11

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Pembukaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2016 di Kementerian Perhubungan
2	Materi Koordinasi	Materi Rakor yaitu sebagai berikut: 1. Sinkronisasi Program/Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkaitan dengan program prioritas yang akan dibiayai melalui APBN tahun 2016 2. Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu pada Permenhub No. PM 3 Tahun 2014 3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan kinerja Kemenhub tahun 2014
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	UPT Kementerian Perhubungan, Bappeda Provinsi Se-Indonesia, Dinas Perhubungan Provinsi Se-Indonesia
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp 7.494.800
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Tersosialisasinya Pedoman Penyusunan RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu pada Permenhub No. PM 3 Tahun 2014 sehingga usulan Pemda dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan Tersosialisasinya mekanisme pengusulan program kegiatan TA 2016 yang didasarkan pada Instruksi Menhub No 2 Tahun 2015 Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur Perhubungan Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan dan Rencana Kerja SKPD Perhubungan
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai bahan usulan Musrenbang Nasional untuk RKP tahun 2016 Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian Perhubungan dengan Renja SKPD tahun 2016

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (4)
Tabel III.12

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	A. FGD Kawasan Strategis Nasional dan Poros Maritim yang dilaksanakan di Kemenko Perekonomian pada tanggal 18 Maret 2015 B. Pertemuan Gubernur Kaltim dengan Menteri Bappenas yang dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 20 maret 2015
2	Materi Koordinasi	A. Materi FGD yaitu sebagai berikut: 1. Arah kebijakan dan Strategi Upaya Percepatan Pembangunan Kawasan Strategi Nasional(KSN) serta analisis dampak percepatan pembangunan KSN sebagai Daya Dukung Kebijakan Poros Maritim. Materi ini disampaikan oleh Sekretariat KP3EI 2. Kesiapan Regulasi Pembangunan Kawasan Industri untuk mendukung Percepatan Pembangunan KSN di Kaltim. Materi ini disampaikan oleh Kementerian Perindustrian 3. Evaluasi Kesiapan Regulasi dan SDM IPTEK dalam mendukung Percepatan Pembangunan KSN Kalimantan Timur. Materi ini disampaikan oleh Kadishub Prov. Kaltim 4. Kesiapan dan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Laut untuk mendukung Percepatan Pembangunan KSN di kalimantan Timur. Materi ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan B. Materi Pertemuan Gubernur Kaltim dengan Menteri Bappenas yaitu sebagai berikut: Pemaparan Gubernur tentang Program Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur terutama yang membutuhkan dukungan dana APBN
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kemenko Perekonomian, Kementerian Bappenas, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, BKPM Wilayah II, Tim KP3EI, PT Pelindo IV, Bappeda Kota Balikpapan
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Kawasan Strategis Nasional di Kaltim serta program/kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur Kaltim

NO	ITEM	DESKRIPSI
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pengembangan 8 kawasan strategis nasional di Kaltim • Mendorong agar ALKI II masuk dalam rancangan Rute Tol Laut yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan • Mendorong agar adanya perbaikan regulasi yang berpihak pada percepatan pembangunan infrastruktur daerah dalam mendukung KSN • Memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur KSN terutama di Kaltim
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pihak mendukung upaya percepatan penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan di daerah; 2. Mengajukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mengikat pada program/kegiatan yang bersifat mendesak di KEK MBTK (yang dibiayai melalui APBN) untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan nantinya 3. Mengirimkan argumentasi tertulis (melalui surat resmi) terkait usulan pemasukan ALKI II dalam skema jalur Tol Laut yang disusun oleh Kementerian Perhubungan; 4. Pemerintah daerah diminta untuk terus memantau komitmen realisasi investasi di KEK MBTK oleh swasta, sebagai penguat argumentasi dalam pengalokasian anggaran APBN bagi kawasan tersebut; 5. Status KEK MBTK terlebih dahulu harus dioptimalkan sebelum diusulkan menjadi KSN, sementara payung hukum pembiayaan infrastruktur KEK MBTK melalui APBN akan diproses melalui Instruksi Presiden; 6. Mendukung upaya percepatan persetujuan AMDAL Maloy setelah ditetapkannya Perda RTRWP Kaltim dan Perda RTRWK Kutai Timur; 7. Kemenko Perekonomian berencana untuk melaksanakan forum setiap minggu dengan para pemerintah daerah yang memiliki kawasan industri dalam rangka memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholders.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (5)

Tabel III.13

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Koordinasi Program Kerja Kementerian Perhubungan RI di Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2015
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI dalam rangka melihat keberhasilan program kementerian Perhubungan di Prov. Kaltim 2. Sosialisasi program dan anggaran Kementerian Perhubungan TA 2016
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan prov. Kaltim, Dinas PU Prov. Kaltim
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan yaitu proyek TOL, Bandara Samarinda Baru, Bandara Sepinggian serta terkait sarana dan prasarana transportasi perhubungan di Kaltim
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan di Kaltim
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai bahan evaluasi program kerja Kementerian Perhubungan dan SKPD teknis di Prov. Kaltim • Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian PUPR dengan Renja SKPD

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (6)

Tabel III.14

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta tanggal 9 Maret 2015
2	Materi Koordinasi	Materi Rakor yaitu sebagai berikut:



		1. Tindak Lanjut Kesepakatan Pengelolaan ALKI II 2. Paparan rencana pengelolaan ALKI II
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Koordinator Kemaritiman, Balitbangda Prov. Kaltim, Pemprov yang berada pada jalur ALKI II
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait rencana pengelolaan ALKI II
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan ALKI II
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Forum Komunikasi dan riset di kawasan ALKI II • Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan dalam mendukung pengembangan 8 kawasan strategis di Kaltim

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
 Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (7)
 Tabel III.15

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Sekretariat FKRP2RK di Kalimantan Tengah
2	Materi Koordinasi	Materi Rakor yaitu sebagai berikut: 1. Evaluasi Usulan FKRP2RK tahun 2015 terhadap DIPA 2015 2. Rencana Kerja FKRP2RK tahun 2015 3. Persiapan Pertemuan Gubernur se Kalimantan
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Bappeda Provinsi se Kalimantan
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Evaluasi dan Rencana Kerja Forum Regional Kalimantan Tahun 2015
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat FKRP2RK Tahun 2015 serta sinkronisasi usulan program/kegiatan se Kalimantan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Regional Kalimantan
7	Tindak Lanjut Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai bahan Usulan Musrenbang Nasional



NO	ITEM	DESKRIPSI
	Koordinasi	untuk Rencana Kerja Pemerintah Pusat • Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian/Lembaga dengan Renja SKPD

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
 Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (8)
 Tabel III.16

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
2	Materi Koordinasi	1. Rancangan Awal RKP 2016 dan Pagu indikatif 2016 2. Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Pra Musrenbangnas 3. Tata cara Pelaksanaan Anggaran TA 2016
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Bappenas, Bappeda Se Indonesia, Kementerian/Lembaga
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Program Prioritas yang diusulkan untuk didanai APBN
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Tersosialisasinya Rancangan Awal RKP 2016 dan Pagu indikatif 2016 serta mekanisme Pelaksanaan Pra Musrenbangnas dan Anggaran 2016
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	• Sebagai bahan Usulan Pra Musrenbang Nasional untuk Rencana Kerja Pemerintah Pusat • Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian/Lembaga dengan Renja SKPD

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
 Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (9)
 Tabel III.17

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
2	Materi Koordinasi	Materi Rakor yaitu sebagai berikut: 1. Sosialisai terkait Penyusunan Rencana

NO	ITEM	DESKRIPSI
		Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) 2. Identifikasi kegiatan prioritas daerah yang dibutuhkan dalam kegiatan RP2IJM
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Bappeda Se Indonesia
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Program Prioritas yang diusulkan untuk didanai APBN
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Tersosialisasinya Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan investasi infrastruktur di Kawasan Kalimantan Timur
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Pemerintah Provinsi memfasilitasi koordinasi pembahasan kegiatan RP2IJM dengan Kab/Kota Pemerintah Provinsi dan Kab Kota mengidentifikasi kegiatan sebagai bahan usulan untuk RP2IJM yang disesuaikan dengan RPJM dan RPJMD

5) Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang P3D (1)

Tabel III.18

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Forum Kerjasama Pemerintah Prov. Kaltim dengan Universitas Mulawarman dalam mengevaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
2	Materi Koordinasi	Evaluasi Tahun Ketiga RJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Universitas Mulawarman
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 pada DPA Bappeda Prov. Kaltim dalam kegiatan Pengendalian dan Evaluasi dengan Jumlah Anggaran Rp.174.000.000,-

NO	ITEM	DESKRIPSI
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	<p>Terdiri 8 Kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Pendahuluan 2. Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat dan ke Daerah 3. Permintaan Data Sekunder 4. Pengolahan dan Menganalisa Data 5. Penyusunan Laporan Antara 6. Konsultasi dan Konfirmasi Progres Hasil Evaluasi 7. Koneksi Penyusunan Laporan Akhir 8. Penyusunan Laporan Akhir
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<p>Hasil : Laporan Evaluasi Hasil Tahun Kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018</p> <p>Manfaat : Menjadi Bahan Evaluasi dan masukan bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun berikutnya</p>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemerintah Daerah dan SKPD untuk memiliki data informasi pembangunan yang lengkap dan akurat 2. Melakukan komunikasi yang lebih intens secara vertikal maupun horizontal 3. Review dan penyusunan Program-program pembangunan beserta indikator dalam RPJMD 2013-2018 dengan RPJMN 2014-2019 4. Optimalisasi partisipasi para pihak/pemangku kepentingan (Stakeholders) baik dari unsur swasta maupun masyarakat 5. Mengaklarkan dan mengejar ketercapaian target pembangunan

Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang P3D (2)

Tabel III.19

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Satuan Kerja Bappeda Provinsi Kaltim Dana Dekonsentrasi urusan pemerintahan Kementrian PPN/Bappenas
2	Materi Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penguatan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional • Fasilitasi koordinasi peningkatan kualitas Musrenbangnas

NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kesekretariatan dekonsentrasi TA. 2016
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Bappenas RI
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Dana Dekonsentrasi Bappenas RI, Jumlah Anggaran Rp.1.006.291.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	6 Kegiatan
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat koordinasi Perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sarana Prioritas Nasional • Memperkuat koordinasi Perencanaan pusat dan daerah
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintansipkan koordinasi antara anggota satuan kerja Bappeda Provinsi Kaltim • Mengadakan rapat koordinasi antara anggota satuan kerja • Berkoordinasi dengan Inspektorat Utama Kementerian PPNterkait dengan penyesuaian laporan akuntabilitas dan laporan manajerial

6) Bidang Statistik dan Pengendalian

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
 Bidang Statistik dan Pengendalian (1)
 Tabel III.20

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Triwulan terkait pelaporan pelaksanaan APBN di Provinsi Kalimantan Timur
2	Materi Koordinasi	Realisasi Keuangan dan fisik serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Semua Instansi Vertikal dan SKPD pelaksana Program/Kegiatan bersumber Dana APBN
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Provinsi
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	4 Kali Koordinasi (per Triwulan)
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Hasil : Pelaporan Evaluasi Manfaat : Sebagai bahan Penyusunan Program/Kegiatan Tahun mendatang
7	Tindak Lanjut Hasil	Rapat Koordinasi dengan Bappenas dan

	Koordinasi	Kementerian terkait di tingkat pusat
--	------------	--------------------------------------

Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Bidang Statistik dan Pengendalian (2)

Tabel III.21

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Buku Data Pembangunan Kalimantan Timur b. Penyusunan Buku Analisis PDRB Lapangan Usaha dan Penggunaan Tanah 2010-2015 c. Penyusunan Laporan Triwulanan Perekonomian Kaltim Tahun 2016 d. Rapat Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan Se Kalimantan Timur 2016 e. Konreg PDRB Se Kalimantan f. Evaluasi Sistem Informasi Data (SIDATA) Pembangunan Kaltim
2	Materi Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data dan klarifikasi data pembangunan Kaltim b. Pengumpulan Data dan Penyusunan Dokumen Analisis PDRB c. Pengumpulan Data dan Penyusunan Dokumen Laporan Triwulan d. Pengumpulan Data Pembangunan Kaltim dengan Kab/Kota e. Isue issue strategis terkait ekonomi dan Pembangunan f. Memberikan Evaluasi dan Klarifikasi Data SIDATA
3	Instansi Pusat Yang Terlibat	<ul style="list-style-type: none"> a. BPS, Kementrian Agama, BKKBN, Polda, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, BPN, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Kaltim, SKPD Prov. Kaltim b. BPS Provinsi Kaltim c. BPS Provinsi Kaltim d. BPS Provinsi Kaltim dan BPS Kab/Kota e. BPS RI, BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota Se Kalimantan f. BPS, BKKBN, Polda, BPN, Kementerian Hukum dan HAM, SKPD Prov. Kaltim
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Tahun 2016



NO	ITEM	DESKRIPSI
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dua b. Dua c. Empat d. Satu e. Satu f. Dua
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya data yang valid dari SKPD dan Instansi vertikal untuk penyusunan Data Pembangunan Kaltim b. Tersedianya Data PDRB menurut Lapangan Usaha dan Penggunaan yang digunakan untuk mempelajari pola perekonomian daerah untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang c. Tersedianya informasi perkembangan angka PDRB Kaltim per Triwulan dan beberapa indikator Ekonomi dan Sosial lainnya d. Data Provinsi dan Data Kab/Kota telah sinkron e. Memperoleh hasil analisis ekonomi yang akurat melalui pembahasan antar sektor dan antar Provinsi se Kalimantan f. Tersedianya data Prov Kaltim yang cepat, akurat dan ter update
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Klarifikasi dengan Instansi terkait digunakan sebagai dasar penyusunan Buku Data Pembangunan Kaltim 2016 b. Penyusunan Dokumen PDRB c. Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Perekonomian d. Acuan Penyusunan Buku Data Pembangunan Kaltim e. Untuk Penyusunan kebijakan Ekonomi ke depannya yang sejalan dengan karakteristik dan potensi Ekonomi Kalimantan f. Data cepat, tepat dan akurat sehingga ke depan diperlukan Update Data dari masing-masing SKPD dan Instansi Vertikal





BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BAPPEDA Provinsi Kaltim Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu SKPD di lingkup pemerintah Prov. Kaltim akan menjadi bahan bagi penyusunan LPPD Pemerintah Prov. Kaltim Tahun 2016. Selanjutnya laporan ini disampaikan kepada Pemerintah (Presiden RI), DPRD Prov. Kaltim dan masyarakat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Pemerintah Prov. Kaltim Tahun 2016.

Tim penyusun menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, untuk itu saran perbaikan sangat kami harapkan, baik berkenaan dengan penyusunan laporan maupun kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan *good governance* dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Akhirnya, atas kerja sama dan dukungan semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Perencanaan Pembangunan

2. Statistik

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan		Capaian Kinerja Urusan		KETERANGAN
						Perencanaan Pembangunan	Statistik	Perencanaan Pembangunan	Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak (Tidak Ada) program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak (Tidak Ada) program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 (satu) program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 (satu) program	Tidak Ada	1 (satu) Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada 1 yang terdiri dari: 1. SOP tentang penyusunan RKPD	Apabila Ada, sebutkan ada (...) yang terdiri dari: ...	Ada	Tidak Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Perda Tidak Ada	Perda Tidak Ada	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan		Capaian Kinerja Urusan		KETERANGAN
						Perencanaan Pembangunan	Statistik	Perencanaan Pembangunan	Statistik	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	-	100 %	100 %	1 Eselon II 7 Eselon III 15 Eselon IV
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Tidak Ada.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Tidak Ada.	Tidak ada	Tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 108 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 7234 personil	- PNS SKPD , sebanyak 8 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 7234 personil	1,49 %	1,11 %	Mengacu DUK SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.	100 %	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.	100 %	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015 .
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 jenis dokumen	Tidak ada Pemisahan Dokumen Perencanaan	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 15 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 15 program.	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan RENJA BAPPEDA.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 15 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 15 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan RENJA BAPPEDA.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan		Capaian Kinerja Urusan		KETERANGAN
						Perencanaan Pembangunan	Statistik	Perencanaan Pembangunan	Statistik	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-BAPPEDA tahun 2015 dan dokumen DPA-BAPPEDA tahun 2015.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Realisasi Belanja SKPD, sebesar Rp42.935.175.068,- - Total APBD 2015, sebesar Rp11.534.260.000.000,	- Total Realisasi Belanja SKPD, sebesar Rp15.365.595.963,- - Total APBD 2015, sebesar Rp11.534.260.000.000,	0,37 %	0,13 %	Mengacu Perubahan APBD tahun 2015.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total Belanja Modal SKPD, sebesar Rp1.243.542.500,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp42.935.175.068,-	- Total Belanja Modal SKPD, sebesar Rp8.781.492.500,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp15.365.595.963,-	2,90 %	57,15 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp609.746.806,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp22.853.452.805,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp0,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp4.361.768.463,-	2,67 %	0,00 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp609.746.806,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp42.935.175.068,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp0,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp15.365.595.963,-	1,42 %	0,00 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 laporan, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 laporan, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	Tidak Ada Pemisahan Dokumen	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CALK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Buku Inventarisasi Gabungan	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Buku Inventarisasi Gabungan	Ada	Ada (menjadi satu dengan Urusan Perencanaan)	Tabel Neraca Barang
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp1.365.737.003,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp67.678.068.063,-.	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp0,-. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp0,-.	2,02 %	0,00 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan		Capaian Kinerja Urusan		KETERANGAN
						Perencanaan Pembangunan	Statistik	Perencanaan Pembangunan	Statistik	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman Bappeda Prov. Kaltim 2. Website Bappeda Prov. Kaltim. 3. Website OneDataOneMap 4. Majalah Buletin Bappeda Prov. Kaltim 5. Informasi di mass media 6. Papan pengumuman elektrik	1. Papan Pengumuman Bappeda Prov. Kaltim 2. Website Bappeda Prov. Kaltim. 3. Website OneDataOneMap 4. Majalah Buletin Bappeda Prov. Kaltim 5. Informasi di mass media 6. Papan pengumuman elektrik	6 jenis.	Tidak Ada Pemisahan Pemisahan Fasilitas	Website Bappeda Prov. Kaltim http://bappeda.kaltimprov.go.id Website OneDataOneMap http://onedataonemap.kaltimprov.go.id
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, Kajian Pengukuran Index Kepuasan Layanan Infrastruktur	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	